

**ANALISIS DEMOGRAFI PELAKU KECURANGAN KORUPSI  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI  
(STUDI BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDUNG)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

**Oleh:  
Benedictus Peter Sinaro  
2014130185**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
(Terakreditasi oleh BAN-PT No. 227/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2018**

**ANALYSIS OF CORRUPTORS DEMOGRAPHY TO  
PREVENT CORRUPTION (STUDY ON COURT  
JUDGMENT AT BANDUNG DISTRICT)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

*Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Economics*

**By:  
Benedictus Peter Sinarto  
2014130185**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING  
Accredited by National Accreditation Agency  
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013  
BANDUNG  
2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS DEMOGRAFI PELAKU KECURANGAN  
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI  
(STUDI BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDUNG)**

Oleh:

Benedictus Peter Sinarto  
2014130185

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Benedictus Peter Sinarto  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Oktober 1996  
NPM : 2014130185  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  
ANALISIS DEMOGRAFI PELAKU KECURANGAN KORUPSI  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI  
BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDUNG)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:  
Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2018

Pembuat pernyataan :



( Benedictus Peter Sinarto )

## ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengenali profil pelaku korupsi, salah satunya dengan membuat demografi pelaku korupsi. Dengan mengenali profil pelaku korupsi diharapkan pencegahan dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan sasaran. Korupsi pada era Reformasi cenderung tersebar di berbagai daerah seiring dengan diberlakukannya desentralisasi oleh pemerintah. Berbeda dengan korupsi pada era Orde Baru yang tersentralisasi. Oleh karena itu dibutuhkan profil pelaku korupsi yang bersifat khusus dari suatu daerah, karena tentunya kecenderungan korupsi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya.

Penelitian ini membuat demografi pelaku korupsi dengan melakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili tindak pidana korupsi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, walaupun terdapat beberapa kasus yang bukan dilakukan di Jawa Barat. Dengan membuat sebuah profil dari pelaku korupsi di Jawa Barat, diharapkan dapat membantu pencegahan korupsi di Jawa Barat dengan lebih baik agar pencegahan korupsi dapat tepat sasaran.

Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan dokumentasi putusan yang ada di Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili tindak pidana korupsi agar menghasilkan demografi koruptor yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan kerugian akibat korupsi serta dilengkapi dengan gambaran umum perilaku korupsi. Putusan pengadilan diperoleh dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama. Dari jenis kelamin, pelaku korupsi mayoritas adalah laki-laki. Namun dalam rata-rata kerugian, antara perempuan dan laki-laki memiliki rata-rata kerugian yang hampir sama. Dari segi usia, mayoritas pelaku korupsi berusia produktif. Pelaku yang lebih tua memiliki kecenderungan menghasilkan kerugian yang lebih tinggi. Dari segi pendidikan, mayoritas pelaku korupsi pernah menempuh pendidikan tinggi dan semakin tinggi pendidikan pelaku korupsi memiliki kecenderungan untuk menimbulkan kerugian korupsi lebih besar. Dari segi pekerjaan, pelaku korupsi mayoritas bekerja sebagai PNS dan pelayan masyarakat lainnya seperti Kepala Desa dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kata kunci: Korupsi, Demografi, *Fraud*, Pencegahan

## ABSTRACT

*Corruption is a major and also a huge problem that faced by Indonesia. We can prevent corruption by different ways, such as identifying the perpetrator of corruption, and also by making demographic perpetrators of corruption. By recognizing the perpetrators of corruption, prevention is expected to be more effective and efficient. Corruption in the Reformation era tended to spread in different regions as decentralization by the government. It was different from the centralized New Order era. Therefore, regional based profile is needed, because the tendency of corruption in a region can be different from other regions.*

*This study is developed a demographic of corruptor by conducting a case study on Court Judgment at Bandung District on some corruption cases that occurred in West Java. Nevertheless, there are some cases outside of West Java. The profile of corrupt perpetrators in West Java, is aimed to support the corruption prevention in West Java distinct effectively.*

*This research is conducted by carrying out documentation of the Court Judgment at Bandung District on corruptions in order to produce corruptor demographic covering gender, age, education background, type of job, financial losses of corruption, and general description of corruption behavior. Court ruling is obtained from the website of the Ruling Directory of the Republic of Indonesia's Supreme Court.*

*The result of this research is that some of the criminal acts of corruption are done together. Between the two genders, the majority of perpetrators of corruptions are male. But in average losses, women and men have average equal losses. In terms of age, the majority of corrupt perpetrators are in productive age. Older corruptors have a tendency to generate higher losses. In terms of education, the majority of perpetrators of corruption have higher education and the higher education of corrupt perpetrators, the higher losses of their corruption. In term of type of job, majority of corrupt perpetrators are government employees and other public servants such as headman of village and member of regional house of representative.*

*Keywords: Corruption, Demography, Fraud, Prevention*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DEMOGRAFI PELAKU KECURANGAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDUNG)”.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ir. Sinarto Djunadi dan Ibu Dwi Handayani, S.E. yang telah memberikan dukungan kepada saya baik secara materil maupun moril dan selalu memantau saya dalam mengerjakan skripsi.
2. Orang tua kedua saya, nenek saya, Ibu Djulianti Djunadi yang telah menganggap saya sebagai anaknya sendiri dan saya anggap sebagai ibu sendiri. Tanpa dukungannya saya tidak akan bisa menjadi ‘saya’ yang sekarang ini.
3. Bapak tiri saya, Bapak Bibit Gunawan, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan dan juga banyak memberikan saran.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan solusi-solusi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Wali saya, Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Dra., M.Si. yang sudah memberikan banyak masukan kepada saya selama saya kuliah di Unpar.
6. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Ak. ,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ketiga adik-adik saya, Pavel, Karina, dan Sergio yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Keluarga saya yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

10. Guru favorit saya di SMA, Bapak Drs. Yosafat Anjar Wibowo, S.H., M.Kn. yang menjadi inspirasi saya dalam berpikir kritis dan telah mengajarkan kepada saya agar 'belajar dari sejarah'.
11. Teman baik saya Aloysius Eka Kurnia, yang telah menjadi pendengar dan pemberi saran yang baik saat saya mengerjakan skripsi. Salam gerakan perubahan!
12. Teman baik saya Jonathan Satyaatmaja Hadiprojo dan Tanti K.S. (Ka'es) yang sudah membantu saya dalam penyusunan skripsi.
13. Deo, Cipi, Tanti, Elva G.P., Arthur, Haggai, Veve, Yessi, Arsibal, Bayu, Chris Nathan, Gerry, selaku teman-teman saya di Non-PM HMPSA 2016/2017 yang sudah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran hidup bagi saya.
14. Vidi dan Jotan selaku teman seperjuangan saya di Departemen Pengabdian Masyarakat HMPSA 2016/2017 yang telah rela saya reportkan dalam bekerja di departemen.
15. Teman-teman lain di HMPSA yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
16. Pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar dapat menambah pengetahuan penulis. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat membawa manfaat positif bagi bangsa dan negara.

Bandung, Juni 2018

Benedictus Peter Sinto



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian .....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4. Kerangka Pemikiran .....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. <i>Fraud</i> .....	8
2.1.2. <i>Fraud Tree</i> .....	8
2.1.3. Korupsi .....	9
2.1.4. Demografi.....	11
2.1.5. Pencegahan Korupsi .....	12
2.1.6. Payung Hukum Pencegahan Korupsi di Indonesia .....	14
2.2. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2.1. Penelitian Demografi Pelaku <i>Fraud</i> oleh ACFE Indonesia Chapter .....	14
2.2.2. Penelitian Demografi Pelaku <i>Fraud</i> oleh ACFE Global.....	20
2.2.3. Penelitian Perilaku Anti Korupsi Tahun 2017 oleh BPS .....	26
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	32
3.1. Metode Penelitian.....	32
3.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
3.1.2. Langkah Penelitian.....	32

3.1.3.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
3.1.4.	<i>Margin of Error</i> dan Tingkat Kepercayaan.....	34
3.1.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.2.	Objek Penelitian .....	36
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1.	Gambaran Umum Perilaku Korupsi .....	38
4.2.	Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.3.	Pelaku Korupsi Berdasarkan Usia .....	42
4.4.	Pelaku Korupsi Berdasarkan Pendidikan .....	45
4.5.	Pelaku Korupsi Berdasarkan Pekerjaan.....	48
4.6.	Pencegahan Korupsi Berdasarkan Demografi Pelaku Korupsi .....	50
4.7.	Pencegahan Korupsi di Indonesia .....	52
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1.	Kesimpulan.....	57
5.2.	Saran .....	58
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2005-2015 (dalam skala 0-10) .....	2
Tabel 2.1. Bentuk Tindak Korupsi .....	10
Tabel 2.2. Rangkuman Indeks Persepsi Anti –Korupsi Indonesia 2012-2017.....	27
Tabel 2.3. Pendapat Tentang Akar Korupsi di Masyarakat Tahun 2017 .....	29
Tabel 4.1. Hukuman Pelaku Korupsi .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pemikiran .....	7
Gambar 2.1.	<i>Fraud Tree</i> .....	9
Gambar 2.2.	Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2003-2016.....	15
Gambar 2.3.	Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Pendidikan di Indonesia Tahun 2003-2016.....	16
Gambar 2.4.	Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Usia di Indonesia Tahun 2003-2016.....	16
Gambar 2.5.	Besarnya Kerugian Akibat Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2016 .....	17
Gambar 2.6.	Besarnya Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2003-2016 .....	18
Gambar 2.7.	Besarnya Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Pendidikan di Indonesia Tahun 2003-2016 .....	19
Gambar 2.8.	Besarnya Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Usia di Indonesia Tahun 2003-2016 .....	20
Gambar 2.9.	Jumlah Pelaku <i>Fraud</i> Berdasarkan Posisi dalam Pekerjaan di Dunia Tahun 2014 .....	21
Gambar 2.10.	Rata-rata Kerugian Akibat <i>Fraud</i> Berdasarkan Posisi dalam Pekerjaan di Dunia Tahun 2014 .....	22
Gambar 2.11.	Jumlah Pelaku <i>Fraud</i> Berdasarkan Posisi dalam Pekerjaan di Dunia Tahun 2014 .....	23
Gambar 2.12.	Jumlah Pelaku <i>Fraud</i> Berdasarkan Jenis Kelamin di Dunia Tahun 2014 .....	24
Gambar 2.13.	Rata-rata Kerugian Akibat <i>Fraud</i> Berdasarkan Jenis Kelamin di Dunia Tahun 2014 .....	24
Gambar 2.14.	Rata-rata Kerugian Akibat <i>Fraud</i> Berdasarkan Usia di Dunia Tahun 2014.....	25
Gambar 2.15.	Jumlah Pelaku <i>Fraud</i> Berdasarkan <i>Tenure</i> di Dunia Tahun 2014 .....	25

Gambar 2.16. Rata-rata Kerugian Akibat <i>Fraud</i> Berdasarkan <i>Tenure</i> di Dunia Tahun 2014 .....	26
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian .....	33
Gambar 4.1. Gambaran Umum Perilaku Korupsi .....	39
Gambar 4.2. Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Gambar 4.3. Rata-rata Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Gambar 4.4. Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Usia .....	44
Gambar 4.5. Rata-rata Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Usia .....	45
Gambar 4.6. Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Pendidikan.....	46
Gambar 4.7. Rata-rata Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Pendidikan.....	47
Gambar 4.8. Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	48
Gambar 4.9. Rata-rata Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Data

Lampiran 2. Contoh Putusan

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Korupsi sudah lama menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi bahkan sudah dilakukan sejak Indonesia memasuki zaman kerajaan-kerajaan. Pada masa itu korupsi dilakukan oleh raja, pejabat kerajaan, dan kerabat kerajaan dengan penyalahgunaan wewenang terhadap upeti. Korupsi juga dilakukan pada masa Kolonialisme Belanda (NU Online, 2017). Di era kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan Orde Baru pun tidak luput dari adanya tindak korupsi. Pada masa itu korupsi dilakukan melalui perdagangan gelap dan perilaku kolusi para pejabat pemerintah dan penyelewengan gelontoran kredit dari pemerintah oleh para kreditur (NU Online, 2017).

Rezim Orde Baru (1965-1998) menjadi rezim yang terkenal akan sifat korupnya (Indonesia Investments, 2017), bahkan Transparency International (TI) pada tahun 2004 menjadikan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia dengan kerugian negara sebesar US \$15-35 juta selama beliau menjabat (Merdeka, 2016). Salah satu karakteristik penting korupsi selama era Orde Baru adalah korupsi tersebut bersifat terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha dapat memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya 'tambahan' dan mereka mengetahui siapa orang-orang yang perlu mereka suap. Modus lain dari korupsi yang ada di era Orde Baru adalah memasukkan kroni Presiden Soeharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit (Indonesia Investments, 2017).

Pada masa Reformasi, terjadi perubahan pola korupsi. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah, maka korupsi menjadi tidak lagi terpusat. Korupsi menjadi cenderung terpecah-pecah dan tidak jelas. Dengan adanya desentralisasi, setiap pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah baru yang sering tidak dirancang dengan ketat (Indonesia Investments, 2017). Dengan kata lain, korupsi pada era Reformasi dapat terjadi secara menyebar di setiap daerah seiring dengan desentralisasi pemerintahan.

Pada tahun 2016, tingkat korupsi Indonesia masih tinggi. Hal ini sesuai dengan laporan dari Transparency International (TI), dimana *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia memiliki skor 37 (dalam skala 0-100) atau berada di peringkat ke-90 dari 176 negara. Sebagai perbandingan dengan negara di Asia Tenggara, Singapura berada di peringkat ke-7 dengan skor CPI 87, Brunei Darusalam di peringkat ke-41 dengan skor 58, dan Malaysia di peringkat ke-55 dengan skor 49 (VOA Indonesia, 2016). Walaupun demikian, terdapat perbaikan CPI Indonesia dari tahun ke tahun. Setidaknya dari tahun 2005, CPI Indonesia terus mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2005-2015 (dalam skala 0-10)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	2,2	2,4	2,3	2,6	2,8	2,8	3,0	3,2	3,2	3,4	3,6

Sumber: Transparency International, dalam Indonesia Investments, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi perbaikan CPI di Indonesia selama tahun 2005 sampai dengan 2015. Pada tahun 2016 CPI Indonesia adalah 3,7 (dalam skala 0-10). Hal ini menunjukkan kecenderungan CPI yang semakin membaik. Namun, meskipun CPI merepresentasikan perkembangan nyata, angka ini harus dimaknai dengan hati-hati karena metodologi yang digunakan dalam jajak pendapat berubah dari tahun ke tahun (Indonesia Investments, 2017).

Terlepas dari adanya perbaikan CPI yang dialami Indonesia, pemerintah masih harus melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi. Selama semester pertama tahun 2017, Indonesia Corruption Watch mencatat ada 226 kasus korupsi dengan 587 orang tersangka dan merugikan negara sebesar Rp1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp118,1 miliar (Detik, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih banyak dilakukan dan membuat kerugian yang besar untuk negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2016), jenis *fraud* yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 67% dan korupsi juga merupakan jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia, di mana kerugian akibat korupsi adalah 77% dari total seluruh kerugian akibat *fraud*.



ACFE Indonesia Chapter (2016) menjelaskan pentingnya mengungkap profil pelaku *fraud* bagi Indonesia sebagai negara yang peringkat korupsinya buruk. Indonesia perlu mempunyai gambaran tentang berbagai bentuk dan pola korupsi atau *fraud* serta profil pelakunya. Dengan memperoleh gambaran yang lengkap tersebut, maka strategi anti-*fraud* yang sudah dan akan dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berjalan efektif.

Melihat fenomena tersebut, mengetahui profil dari para pelaku *fraud*, khususnya pelaku korupsi menjadi hal yang penting. Profil para koruptor dapat diketahui dengan cara membuat sebuah demografi yang memuat profil-profil dari koruptor. Profil-profil itu dapat mencakup usia, jenis kelamin, kerugian yang ditimbulkan, jabatan, dan motif dari para koruptor. Karena di era Reformasi ini korupsi dilakukan secara terpencar-pencar di berbagai daerah, maka membuat profil dalam ruang lingkup daerah yang lebih kecil sangat dibutuhkan. Penelitian ini membuat profil demografi pelaku kecurangan korupsi dengan melakukan studi pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dengan mengetahui profil dari para koruptor, diharapkan dapat dilakukan pencegahan terhadap korupsi dan semua pihak dapat bersikap lebih waspada terhadap tindakan korupsi.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum perilaku korupsi dari pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016?
2. Bagaimana demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan jenis kelamin?
3. Bagaimana demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan usia?
4. Bagaimana demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan pendidikan?
5. Bagaimana demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan jenis pekerjaan?
6. Bagaimana kerugian akibat korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016?

7. Bagaimana pencegahan korupsi yang tepat sesuai dengan demografi korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran umum perilaku korupsi dari pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016.
2. Mendeskripsikan demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan jenis kelamin.
3. Mendeskripsikan demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan usia.
4. Mendeskripsikan demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan pendidikan.
5. Mendeskripsikan demografi pelaku korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016 berdasarkan jenis pekerjaan.
6. Mendeskripsikan kerugian akibat korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016.
7. Mendeskripsikan pencegahan korupsi yang tepat sesuai dengan demografi korupsi yang diadili di PN Bandung pada tahun 2014-2016.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi  
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akademisi dapat memiliki rujukan yang baru ketika akan mempelajari tentang perilaku korupsi yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan akan banyak muncul penelitian-penelitian sejenis sehingga dapat saling melengkapi dan memberi gambaran yang lebih nyata tentang korupsi di Indonesia.
2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang demografi pelaku korupsi yang ada di Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan kesadaran akan gambaran korupsi yang ada di Indonesia.

### 3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi secara lebih tepat sehingga pencegahan yang ada dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## 1.4. Kerangka Pemikiran

Demografi merupakan ilmu tentang statistik yang meliputi tentang gambaran yang mengilustrasikan perubahan struktur dari populasi manusia tertentu. Dengan membuat demografi pelaku korupsi maka dapat dikenali profil pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan dan kerugian yang diakibatkannya.

ACFE Indonesia Chapter (2016) memberikan penjelasan bahwa berdasarkan informasi demografi pelaku korupsi dapat diketahui profil para pelaku, gambaran, bentuk, dan pola korupsinya sehingga menjadi dasar penting untuk menyusun strategi anti-*fraud* yang lebih efektif di Indonesia.

Menurut Transparency International (2016), terdapat lima cara untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu:

1. Mengakhiri Impunitas (Kekebalan Pelaku Korupsi dari Hukum)
2. Mereformasi Administrasi Publik dan Pengelolaan Keuangan
3. Mendorong Adanya Transparansi dan Akses Terhadap Informasi
4. Memberdayakan Masyarakat
5. Menutup Akses Korupsi ke Dunia Internasional

Memberdayakan masyarakat menjadi hal yang penting. Menurut Transparency International (2016), salah satu cara memberdayakan masyarakat adalah dengan inisiatif pemantauan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat berkontribusi dalam mendeteksi korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pencegahan terhadap korupsi berdasarkan demografi pelaku korupsi khususnya di Jawa Barat.

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 menyatakan enam strategi nasional pengimplementasian pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu:

1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum
3. Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain
4. Melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi
5. Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi
6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu dari strategi di atas adalah meningkatkan budaya anti korupsi dimana dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam tindakan pencegahan korupsi dan juga diperlukan kajian-kajian pencegahan korupsi di perguruan tinggi.

Dengan membuat demografi dari pelaku korupsi yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan, maka akan didapatkan gambaran tentang profil pelaku korupsi yang ada. Dengan membuat demografi dari pelaku korupsi maka dapat diketahui siapa yang paling banyak melakukan korupsi dari kelompoknya, dan rata-rata kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut.

Dengan adanya gambaran tentang pelaku korupsi maka kita dapat dengan lebih mudah untuk menentukan tindakan pencegahan yang tepat sesuai dengan gambaran pelaku yang ada. Jika dilihat dari segi jenis kelamin, maka jenis kelamin yang paling banyak melakukan korupsi dan paling besar menyebabkan kerugiannya harus menjadi perhatian utama dalam kegiatan pencegahan korupsi. Jika dilihat dari segi pendidikannya, maka perlu diketahui pada tingkat pendidikan mana yang paling banyak melakukan korupsi dan paling besar kerugiannya dalam melakukan korupsi sehingga penempatan pendidikan anti korupsi di jenjang pendidikan dapat menjadi lebih efektif di Indonesia. Usia pelaku korupsi dapat memberikan gambaran tentang usia mana yang rawan menjadi pelaku korupsi sehingga penekanan pencegahan korupsi terhadap usia tertentu dapat dilakukan. Sedangkan, jenis pekerjaan pelaku korupsi akan memberikan gambaran tentang pekerjaan apa yang pengawasannya dan pencegahannya harus lebih diperhatikan.

Dengan adanya penekanan pencegahan korupsi terhadap kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan pembagian demografi yang ada, dengan tetap melaksanakan upaya pemberantasan korupsi yang telah ada maka diharapkan pencegahan korupsi dapat menjadi lebih tepat sasaran.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 1.1.  
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti